MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI JAMBI

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

PENGADILAN TINGGI JAMBI

PENGADILAN TINGGI JAMBI
Jalan Arief Rahman Hakim No. 55
Telanaipura, Jambi

(0741) 63138 – 60440 ptjambimari@gmail.com www.pt-jambi.go.id ptjambi

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun 2023, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Tinggi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2023.

Meningkatnya pelayanan publik melalui birokrasi yang lebih efektif dan efisien merupakan salah satu konsep kinerja di dalam tata pemerintahan yang baik *(Good governance)* di dukung adanya aparat pengadilan yang bersih, transparan, akuntabel dan berkinerja tinggi yang selama ini didambakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Pertanggungjawaban yang transparan melalui laporan setiap tahun merupakan salah satu usaha Pengadilan Tinggi Jambi dan seluruh jajaran Pengadian Negeri yang berada dibawahnya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, lugas dan tuntas tentang rencana, pelaksanaan, evaluasi serta refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang yang dikemas dalam bentuk kegiatan penyampaian laporan kegiatan selama satu tahun secara terbuka kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, Laporan Kegiatan Tahun 2023 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Jambi, dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya aparatur pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terimakasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif, baik pikiran dan tenaga bagi segenap warga Pengadilan Tinggi Jambi serta seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya.

Jambi, 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN TINGGI JAMBI

NUGROHO SETIADJI

DAFTAR ISI

PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
BAB I Pendahuluan 1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum 4
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 4
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 6
B. Penyelesaian Perkara 7
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 7
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 8
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, dan Kasasi ... 9
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi 9
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 10
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 10
1. Posbakum 10
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 11
3. Perkara Prodeo 12
BAB III Sumber Daya Manusia 13
A. Komposisi SDM 13
B. Mutasi 14
C. Promosi 15
D. Pensiun 16
E. Diklat 17
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi 18
A. Pengelolaan Keuangan 18
1. Realisasi Anggaran DIPA 01 19
2. Realisasi Anggaran DIPA 03 19
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 20
1. Kendaraan Dinas 20
2. Rumah Dinas 22
3. Sarana Prasarana gedung dan Fasilitas Perkantoran 23
C. Pengelolaan Teknologi Informasi 32
1. Implementasi E-Court 32
2. Implementasi SIPP 33
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik 34
A. Akreditasi Penjaminan Mutu 34
B. Pembangunan Zona Integritas 34
C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 34
D. Inovasi Pelayanan Publik 35

DAFTAR ISI

BAB VI Pengawasan 36
A. Pengawasan Internal 36
1. Pengawasan Daerah 36
2. Pengawasan Bidang 38
3. Penanganan Pengaduan 40
B. Evaluasi 42

BAB VII Penutup 43
A. Kesimpulan 43
B. Rekomendasi 43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus Tingkat pertama 4
Tabel 2. Keadaan Perkara Perdata Biasa dan Perdata Khusus Tingkat pertama 5
Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2023 6
Tabel 4. Jumlah Perkara yang Mengajukan Banding pada Pengadilan Tingkat Pertama 6
Tabel 5. Jumlah Sisa Perkara Tingkat Banding yang Diputus Tahun 2023 7
Tabel 6. Jumlah Sisa Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diputus Tahun 2023 7
Tabel 7. Jumlah Sisa Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Diputus Tahun 2023 7
Tabel 8. Jumlah Perkara Tingkat Banding yang diputus Tepat Waktu 8
Tabel 9. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus Tepat Waktu 8
Tabel 10. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK 9
Tabel 11. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi 9
Tabel 12. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi 10
Tabel 13. Posbakum Diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi 11
Tabel 14. Jumlah SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2023 13
Tabel 15. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2023 13
Tabel 16. Mutasi Tahun 2023 14
Tabel 17. Promosi Jabatan Tahun 2023 15
Tabel 18. Pensiun Tahun 2023 16
Tabel 19. Diklat Tahun 2023 17
Tabel 20. Realisasi Anggaran DIPA 01 TA. 2023 19
Tabel 21. Realisasi Anggaran DIPA 03 TA. 2023 19
Tabel 22. Daftar Kondisi Kendaraan Dinas 20
Tabel 23. Daftar Kondisi Rumah Dinas 22
Tabel 24. Daftar Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran 23
Tabel 25. Pendaftaran Perkara Melalui E-court Tahun 2023 32
Tabel 26. Inovasi Pengadilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi 35
Tabel 27. Pengawasan daerah tahun 2023 37
Tabel 28. Penanganan Pengaduan Tahun 2023 40

BAB I
PENDAHULUAN

"Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing"

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa :

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Dengan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :

"Organisasi, Administrasi dan financial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap"

Pengadilan Tinggi Jambi merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Jambi yang meliputi :

1. Pengadilan Negeri Jambi kelas IA
2. Pengadilan Negeri Bangko kelas IB
3. Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II
4. Pengadilan Negeri Muara Bungo kelas II
5. Pengadilan Negeri Tungkal kelas II
6. Pengadilan Negeri Sungai Penuh kelas II
7. Pengadilan Negeri Sengeti kelas II
8. Pengadilan Negeri Sarolangun kelas II
9. Pengadilan Negeri Tebo kelas II
10. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kelas II

Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Tinggi Jambi mengemban visi yang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : **"Mewujudkan Pengadilan Tinggi Jambi Yang Agung"**.

Misi Pengadilan Tinggi Jambi dirumuskan dalam rangka mencapai visinya sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Jambi
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Jambi
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Jambi

Tugas pokok Pengadilan Tinggi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, antara lain:

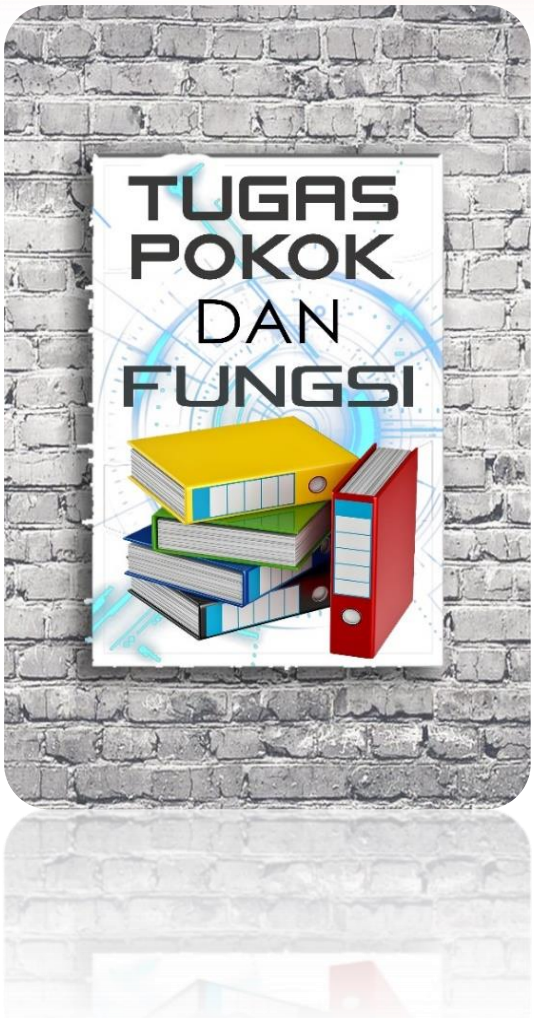

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata ditingkat banding;
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya;
3. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya apabila diminta;
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama dibawahnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama tahun 2023, Pengadilan Tinggi Jambi melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Kebijakan tersebut selain berupa regulasi juga diutamakan dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur. Beberapa kebijakan Mahkamah Agung RI dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jambi dan satuan kerja dibawahnya, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan etika. Pedoman Standar PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diatur dalam SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM03.3/2/2018.
2. Penerapan aplikasi E-Court dengan fitur e-filling (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), e-summons (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Dengan aplikasi E-Court pendaftar

gugatan/permohonan melalui seorang advokat saja tanpa harus datang ke pengadilan. Penerapan E-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018.

3. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesian Court Performance Excellent). Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Jambi dan seluruh satker di wilayah hukumnya telah diakreditasi. Selanjutnya kegiatan akreditasi ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan, dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang professional dan berfokus pada kompetensi. Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi Sikep versi 3.1.0, yang dapat memberikan informasi kepada pimpinan pengadilan tentang peta Sumber Daya Manusia di satuan kerja hingga dapat membantu penambilan keputusan. Sistem ini terintegrasi dengan Sistem Kediklatan MA (Sisdiklat) dan Sistem Pengawasan (Siwas) untuk pertukaran data diklat pengawai dan verifikasi data pemeriksaan pegawai. Kebijakan Mahkamah Agung terkait penataan organisasi. Terdapat dua kebijakan terkait hal ini, yakni Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Perma Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.
5. Pengembangan aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) versi 3.0 yang memuat berbagai perbaikan dan penambahan menu gratifikasi dan menu benturan antar kepentingan. MA juga membangun E-Monitoring pengawasan, aplikasi yang digunakan untuk memonitoring hasil pelaksanaan pengawasan pada Badan Pengawasan yang dilakukan Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pengadilan tingkat pertama. Aplikasi ini untuk keseragaman instrument pengawasan membantu tugas hakim pengawas.
6. Kebijakan Mahkamah Agung dalam hal peningkatan kepercayaan publik dalam pengelolaan perkara, yang dilakukan dengan menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menata kembali mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan yang bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (non-PNBP). Agar proses pelaksanaan peradilan pidana juga lebih terbuka dan akuntabel.
7. Mahkamah Agung juga telah menyusun prosedur baru penyampaian relaas panggilan atau pemberitahuan pihak berperkara yang berada luar negeri. MA dan Kementerian Luar Negeri telah memperbarui Nota Kesepahaman terkait penanganan penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari pengadilan Indonesia ke pengadilan di luar negeri dan dari pengadilan luar negeri ke pengadilan di Indonesia. Selain Nota Kesepahaman, telah ditandatangani pula 3 perjanjian kerjasama dan satu Surat Keputusan Bersama pada tanggal 10 September 2018 antara MA dan Kementerian Luar Negeri. Maka, mulai 12 September 2018 seluruh pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati.
8. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui langkah Reformasi Birokrasi yang bermuara kepada usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan Aparat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi di dalam proses birokrasi yang efektif dan efisien.

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA, DAN AKREDITASI

A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA

Berikut ini rincian keadaan perkara di tingkat pertama pada 10 (sepuluh) pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi tahun 2023

Tabel 1. Keadaan Pidana Biasa dan Pidana Khusus Pengadilan Tingkat Pertama

JENIS PERKARA	PN JAMBI	PN BANGKO	PN MUARA BULIAN	PN SENGETI	PN MUARA BUNGO	PN KUALA TUNGKAL	PN SAROLANGUN	PN SUNGAI PENUH	PN TEBO	PN TJ. JABUNG TIMUR
➢ PIDANA BIASA										
Sisa tahun 2022	134	31	17	14	30	17	4	31	-	22
Masuk tahun 2023	680	173	227	204	296	248	274	188	173	106
Putus tahun 2023	681	182	225	208	326	225	256	198	166	113
Sisa tahun 2023	133	22	19	10	8	40	22	21	7	15
➢ PIDANA ANAK										
Sisa tahun 2022	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masuk tahun 2023	42	6	9	6	5	15	3	23	5	11
Putus tahun 2023	42	6	9	6	5	14	3	23	5	11
Sisa tahun 2023	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
➢ TIPIKOR										
Sisa tahun 2022	11									
Masuk tahun 2023	40									
Putus tahun 2023	32									
Sisa tahun 2023	19									

Tabel 2. Keadaan Perdata Biasa dan Perdata Khusus Pengadilan Tingkat Pertama

JENIS PERKARA	PN JAMBI	PN BANGKO	PN MUARA BULIAN	PN SENGETI	PN MUARA BUNGO	PN KUALA TUNGKAL	PN SAROLANGUN	PN SUNGAI PENUH	PN TEBO	PN TANJUNG JABUNG TIMUR
➢ **PERDATA GUGATAN**										
Sisa tahun 2022	61	5	5	12	12	9	5	25	11	2
Masuk tahun 2023	202	28	28	66	54	21	30	61	22	10
Putus tahun 2023	175	21	14	49	56	26	21	61	27	6
Sisa tahun 2023	66	11	13	29	10	4	14	25	6	6
➢ **PERDATA PERMOHONAN**										
Sisa tahun 2022	11	-	2	-	-	-	-	-	-	1
Masuk tahun 2023	225	18	12	19	8	30	9	137	6	42
Putus tahun 2023	232	18	14	19	8	30	9	134	6	43
Sisa tahun 2023	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Berikut ini rincian keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jambi tahun 2023.

Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2023

PERKARA	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023
PIDANA	24	301	299	26
PIDANA ANAK	1	13	13	1
TIPIKOR	3	9	12	-
PERDATA	16	144	144	16
JUMLAH	44	467	468	43

Tabel 4. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Banding pada Pengadilan Tingkat Pertama

No.	SATUAN KERJA	PERKARA	Jumlah perkara yang mengajukan banding tahun 2023	Jumlah perkara banding yang putus tahun 2023
1.	PENGADILAN NEGERI JAMBI	Pidana	39	38
		Pidana Khusus	9	9
		Perdata	49	49
2.	PENGADILAN NEGERI BANGKO	Pidana	14	11
		Perdata	8	8
3.	PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	Pidana	40	39
		Perdata	5	5
4.	PENGADILAN NEGERI SENGETI	Pidana	32	26
		Perdata	13	17
5.	PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	Pidana	43	38
		Perdata	15	12
6.	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	Pidana	15	13
		Perdata	5	3
7.	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	Pidana	14	13
		Perdata	5	5
8.	PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	Pidana	68	57
		Perdata	28	24
9.	PENGADILAN NEGERI TEBO	Pidana	22	13
		Perdata	13	12
10.	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	Pidana	26	26
		Perdata	4	4

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara pada pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi Tahun 2022 yang diputus tahun 2023.

Tabel 5. Jumlah sisa perkara tingkat banding yang diputus tahun 2023

PERKARA	Sisa Tahun 2022	Sisa perkara tahun 2022 yang diputus Tahun 2023	Persentase penyelesaian perkara
PIDANA	24	24	100%
PIDANA ANAK	1	1	100%
TIPIKOR	3	3	100%
PERDATA	16	16	100%

Tabel 6. Jumlah sisa perkara pidana tingkat pertama yang diputus tahun 2023

SATUAN KERJA	Sisa Tahun 2022	Sisa perkara tahun 2022 yang diputus Tahun 2023	Persentase penyelesaian perkara
PENGADILAN NEGERI JAMBI	146	146	100%
PENGADILAN NEGERI BANGKO	31	31	100%
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	17	17	100%
PENGADILAN NEGERI SENGETI	14	14	100%
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	30	30	100%
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	17	17	100%
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	4	4	100%
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	31	31	100%
PENGADILAN NEGERI TEBO	-	-	100%
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	22	22	100%

Tabel 7. Jumlah sisa perkara perdata tingkat pertama yang diputus tahun 2023

SATUAN KERJA	Sisa Tahun 2022	Sisa perkara tahun 2022 yang diputus Tahun 2023	Persentase penyelesaian perkara
PENGADILAN NEGERI JAMBI	72	72	100%
PENGADILAN NEGERI BANGKO	5	5	100%
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	7	7	100%
PENGADILAN NEGERI SENGETI	12	12	100%
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	12	12	100%
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	9	9	100%
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	5	5	100%
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	25	25	100%
PENGADILAN NEGERI TEBO	11	11	100%
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	3	3	100%

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Sesuai surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, batas penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding dan maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama. Berikut ini rincian jumlah perkara di Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi yang diputus tepat waktu pada tahun 2023.

Tabel 8. Jumlah Perkara Tingkat Banding yang diputus tepat waktu

PERKARA	Jumlah perkara putus Tahun 2023	Jumlah perkara putus tepat waktu	Persentase penyelesaian perkara
PIDANA	299	299	100%
PIDANA ANAK	13	13	100%
TIPIKOR	12	12	100%
PERDATA	144	144	100%

Tabel 9. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang diputus tepat waktu

SATUAN KERJA	PERKARA	Jumlah perkara putus tahun 2023	Jumlah perkara putus tepat waktu	Persentase penyelesaian perkara
PENGADILAN NEGERI JAMBI	Pidana	681	681	100%
	Pidana Khusus	32	32	100%
	Perdata	175	147	97,37%
PENGADILAN NEGERI BANGKO	Pidana	182	182	100%
	Perdata	38	37	93,88%
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	Pidana	234	232	99,15%
	Perdata	38	29	76,32%
PENGADILAN NEGERI SENGETI	Pidana	212	211	99,53%
	Perdata	68	60	88,24%
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	Pidana	164	164	100%
	Perdata	62	59	95,16%
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	Pidana	239	239	100%
	Perdata	56	51	91,07%
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	Pidana	259	258	99,61%
	Perdata	30	25	83,33%
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	Pidana	221	221	100%
	Perdata	195	195	100%
PENGADILAN NEGERI TEBO	Pidana	171	171	100%
	Perdata	33	29	88,88%
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	Pidana	124	124	100%
	Perdata	49	47	95,91%

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, dan Kasasi pada tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

SATUAN KERJA	PUTUS 2023	JUMLAH PERKARA BANDING	JUMLAH PERKARA TIDAK BANDING	JUMLAH PERKARA TIDAK KASASI	JUMLAH PERKARA TIDAK PK
PENGADILAN NEGERI JAMBI	877	97	780	846	870
PENGADILAN NEGERI BANGKO	204	22	182	198	204
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	245	45	200	230	245
PENGADILAN NEGERI SENGETI	257	45	212	238	257
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	361	58	303	340	361
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	295	20	275	288	295
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	325	19	306	315	325
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	402	96	306	356	402
PENGADILAN NEGERI TEBO	262	35	227	256	262
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	119	30	89	89	119

4. JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Mediasi di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Tabel 11. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

SATUAN KERJA	JUMLAH PERKARA MEDIASI	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	TIDAK DAPAT DILAK-SANAKAN	DALAM PROSES
PENGADILAN NEGERI JAMBI	117	10	97	-	10
PENGADILAN NEGERI BANGKO	19	2	17	-	-
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	20	4	14	-	2
PENGADILAN NEGERI SENGETI	44	4	37	2	1
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	25	2	23	-	-
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	19	-	15	3	1
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	15	-	12	2	1
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	61	2	47	8	4
PENGADILAN NEGERI TEBO	15	2	12	-	1
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	7	1	6	-	-

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA").

Berikut ini jumlah perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi yang berhasil melalui diversi.

Tabel 12. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

SATUAN KERJA	JUMLAH PERKARA ANAK	JUMLAH PERKARA DIVERSI	DIVERSI BERHASIL	DIVERSI GAGAL
PENGADILAN NEGERI JAMBI	42	4	3	1
PENGADILAN NEGERI BANGKO	6	-	-	-
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	9	4	2	2
PENGADILAN NEGERI SENGETI	4	1	1	-
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	5	5	1	4
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	15	2	2	-
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	3	1	1	-
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	23	7	7	-
PENGADILAN NEGERI TEBO	5	5	3	2
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	11	-	-	-

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

1. POSBAKUM

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advice hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Berikut data alokasi dan realisasi anggaran Posbakum pada satker sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2023

Tabel 13. Posbakum diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi TA. 2023

SATUAN KERJA	DIPA (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	(%)	SISA DANA (Rp.)
PENGADILAN NEGERI JAMBI	48.000.000	48.000.000	100	-
PENGADILAN NEGERI BANGKO	24.000.000	24.000.000	100	-
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	24.000.000	24.000.000	100	-
PENGADILAN NEGERI SENGETI	24.000.000	24.000.000	100	-
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	24.000.000	24.000.000	100	-
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	24.000.000	24.000.000	100	-
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	24.000.000	24.000.000	100	-
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	24.000.000	24.000.000	100	-
PENGADILAN NEGERI TEBO	24.000.000	24.000.000	100	-
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	24.000.000	24.000.000	100	-

2. SIDANG KELILING

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan baik yang dilakukan secara berkara maupun insidentil yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan dengan alasan jarak, transportasi, dan biaya. Adapun tujuan pelaksanaan sidang pelayan terpadu/sidang keliling menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran adalah :

a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, dan
b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk tahun 2023 seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi tidak melakukan sidang keliling.

3. PERKARA PRODEO

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Adapun yang berhak mengajukan gugatan/ permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat tidak mampu (miskin) secara ekonomis dengan syarat-syarat yang telah diatur.

Adapun prosedur permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yaitu :

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
2. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan diajukan penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftarkan dan deregister dan untuk permohonan yang diajukan Tergugat/ Termohon harus diajukan sebelum mengajukan jawaban dengan melampirkan :
    a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara;
    b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu keluarga miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program keluarga harapat (PKH) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, dan/atauSurat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk tahun 2023 Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi tidak mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan Perkara Prodeo.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

A. KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Pengelompokan SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Jumlah SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2023

SATUAN KERJA	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG												
	Pengatur Muda (II/a)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur (II/c)	Pengatur Tk. I (II/d)	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)	Pembina Muda (IV/a)	Pembina Muda Tk. I (IV/b)	Pembina (IV/c)	Pembina Tk. I (IV/d)	IV/e
PT JAMBI	-	-	5	-	6	3	10	16	7	2	2	6	15
PN JAMBI	-	-	4	-	7	5	11	20	6	5	1	1	-
PN BANGKO	-	2	4	-	3	5	4	8	4	2	-	-	-
PN MUARA BULIAN	-	-	3	-	3	7	6	5	2	1	-	-	-
PN SENGETI	-	-	3	-	4	9		14	2	-	-	-	-
PN MUARA BUNGO	-	-	2	-	6	9	6	6	2	1	-	-	-
PN KUALA TUNGKAL	-	-	4	-	4	10	1	5	1	-	-	-	-
PN SAROLANGUN	-	-	3	1	3	9	6	4	2	-	-	-	-
PN SUNGAI PENUH	-	-	3	-	3	5	4	5	2	-	-	-	-
PN TEBO	-	-	2	-	3	7	1	5	1	2	-	-	-
PN TANJUNG JABUNG TIMUR	-	-	2	-	3	9	6	3	1	2	-	-	-
JUMLAH	**-**	**2**	**35**	**1**	**45**	**78**	**55**	**91**	**30**	**15**	**3**	**7**	**15**

Tabel 15. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No.	SATUAN KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR				
		Sekolah Menengah Atas (SMA)	Diploma III (D3)	Sarjana (S1)	Magister (S2)	Doktor (S3)
1.	PT JAMBI	3	4	43	25	2
2.	PN JAMBI	8	4	39	18	-
3.	PN BANGKO	3	5	18	6	-
4.	PN MUARA BULIAN	2	3	16	6	-
5.	PN SENGETI	-	3	25	4	-
6.	PN MUARA BUNGO	6	2	3	21	-
7.	PN KUALA TUNGKAL	2	2	19	2	-
8.	PN SAROLANGUN	1	3	22	2	-
9.	PN SUNGAI PENUH	2	3	13	4	-
10.	PN TEBO	-	2	11	8	-
11.	PN TANJUNG JABUNG TIMUR	1	4	13	8	-
JUMLAH		**28**	**35**	**222**	**104**	**2**

B. MUTASI

Mutasi SDM pada pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Mutasi Tahun 2023

NO.	NAMA	JABATAN/SATUAN KERJA ASAL	JABATAN/SATUAN KERJA TUJUAN
1.	Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.	Wakil Ketua PT Papua Barat	Wakil Ketua PT Jambi
2.	Dr. K. G. Damanik, SH. M.Hum.	Hakim PT Jambi	Hakim PT Bandung
3.	Jhon tony Hutauruk, S.H., M.H.	Hakim PT Jambi	Hakim PT Tanjung Karang
4.	Ramses Pasaribu, S.H., M.H.	Hakim PT Jambi	Hakim PT Pekan Baru
5.	Nirmala Dewita, S.H., M.H.	Hakim PT Jambi	Hakim Palembang
6.	Elly Noeryasmien, S.H., M.H.	Hakim PT Jambi	Hakim Palembang
7.	Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.	Hakim PT Ambon	Hakim PT Jambi
8.	Ramli Rizal, S.H., M.H.	Hakim PT Banda Aceh	Hakim PT Jambi
9.	Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H.	Panitera PT Jambi	Panitera PT Tanjung Karang
10.	Abner Sirait, S.H., M.H.	Panitera PT Mataram	Panitera PT Jambi
11.	Ariesa Anggarsari, A. Md. T.	PN Bengkayang	PT Jambi
12.	Della Ayudita. S.Kom	PN Jambi	PN Tanjung Karang
13.	Hasnaini Ika Agustin, A.Md.	PN Jambi	PT Yogyakarta
14.	Sumargi,S.H	PN Jambi	PN Sleman
15.	Jasmin Ginting., S.H.	Panitera PN Jambi	Panitera PN Medan
16.	Ananda Munes Suyadi S.H	PP PN Jambi	Panmud Hukum PN Sengeti
17.	Dominggus Silaban,S.H.M.H	Hakim PN Jakarta Pusat	Hakim PN Jambi
18.	M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	Pelaksana PN Bangko	Pelaksana PT TUN Palembang
19.	Fitria Agustiyansah, AM.Kep.	PEMDA Kab. Merangin	Pelaksana PN Bangko
20.	Teguh Hariadi, S.Kom.	Kasubag PTIP PN Sarolangun	Kasubag PTIP PN Bangko
21.	Dyah Devina Maya Ganindra, SH.	Hakim PN Bireun	Hakim PN Muara Bungo
22.	Ferra Sari, ST.	Sekretaris PN Muara Bungo	Kasubag PTIP PTUN Jambi
23.	Dwi Putra Darmawan, SH.	Hakim PN Muara Bungo	Hakim PN Banyumas
24.	Harry Silaban, SH.	PP PN Muara Bungo	Panitera Muda Hukum PN Muara Bungo
25.	Fitri Puspa Anggraini, S.H.	PP PN Sengeti	PP PN Jambi
26.	Iriyanto, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan PN Kuala Tungkal	Kasubbag Umum dan Keuangan PN Sengeti

27.	Syara Fitriani, S.H	Hakim PN Jhanto	Hakim PN Sengeti
28.	Satya Frida Lestari, S.H.	Hakim PN Sungai Penuh	Hakim PN Sengeti
29.	Juliadi, S.Kom.	Sekretaris PN Sarolangun	Sekretaris PN Kuala Tungkal
30.	Adri Helver Roniarta, S.E.	Sekretaris PN Kuala Tungkal	Sekretaris PN Sarolangun
31.	Edi Edison, S.Kom.	Sekretaris PN Tanjung Jabung Barat	Sekretaris PN Tebo
32.	Wahyudi Azmi, S.H.,M.H.	Sekretaris PN Tebo	Sekretaris PN Tanjung Jabung Barat
33.	Mohammad Fikri Ichsan, S.H.,M.Kn.	Hakim PN Tapak Tuan	Hakim PN Tebo
34.	Fadillah Usman, S.H.,M.H.	Hakim PN Simpang Tiga Redellong	Hakim PN Tebo
35.	Sandro Christian Simanjuntak, S.H.	Hakim PN Tebo	Hakim PN Medan
36.	Beatrix Retta Celia, S.T.	Pranata Komputer PN Tebo	Pranata Komputer Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
37.	M. Noviansyah, SH. M.Kn.	Hakim	Hakim PN Sungai Penuh
38.	Wening Indrardi, SH. M. Kn.	Hakim PN Sungai Penuh	Hakim
39.	Satya Firda Lestari, S.H.	Hakim PN Sungai Penuh	Hakim
40.	M. Rendy Priambodo, A. Md.	Fungsional Arsiparis PN Sungai Penuh	Fungsional Arsiparis
41.	Moh Rezwandha Mesya, S.H.	Hakim PN Sabang	Hakim PN Tanjung Jabung Timur
42.	Asminar Fitriyani, S.E.	Sekretaris PN Muara Bulian	Sekretaris PN Tanjung Jabung Timur

C. PROMOSI

Promosi SDM pada pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Promosi Jabatan Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN AWAL	JABATAN PROMOSI
1.	Amin Sutikno, S.H., M.H.	Wakil Ketua PT Jambi	Ketua PT Jayapura
2.	Astriwati, S.H., M.H.	Hakim PN Jakarta Pusat	Hakim Tinggi PT Jambi
3.	Saiful Asnuri, S.H.	PP PT Bandung	Panmud Hukum PT Jambi
4.	Dewi Darmi,S.H.	Panmud Hukum PN Sengeti	PP PT Jambi
5.	Indri Marandi, S.E.	Pelaksana PT Jambi	Kasubag Organisasi dan Kepegawaian PN Muara Bulian
6.	Budi Chandra Permana, S.H., M.H	Hakim PN Jambi	Wakil Ketua PN Mentok
7.	Nur Ikhlas, S.E.Ak	Sekretaris PN Jambi	Sekretaris PT Samarinda
8.	Ananda Munes Suyadi S.H	PP PN Jambi	Panmud Hukum PN Sengeti
9.	Khaidir, S.H., M.H.	Panmud PN Jambi	PP PN Tebo

10.	Jhon Hendriansyah.,S.H.	Panmud Pidana PN Sarolangun	Panmud PHI PN Jambi
11.	Rahadian Nur, S.H., M.H.	Hakim PN Bangko	WKPN Sabang
12.	Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.	Hakim PN Bangko	Hakim PN Tanjung Karang
13.	Rosmalia Maretta, S.H.	Analis Perkara PN Bangko	PP PN Sarolangun
14.	Gloria Ekarini Harpiningrum, S.Psi.	Kasubag PTIP PN Bangko	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PT Kalimantan Utara
15.	Supriadi, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan PN Sengeti	Sekretaris PN Muara Bungo
16.	Arie Saputra	JSP PN Sarolangun	Juru Sita PN Sarolangun
17.	Rizky Madya Wulan, S.T., M.E.	Pelaksana PN Sarolangun	Kasubag Kepegawaian dan Ortala PN Sarolangun
18.	Febri Dwi Saputra, SH.	PP PN Kuala Tungkal	Panmud Hukum PN Kuala Tungkal
19.	Muhammad Hanafi Insya, S.H.	Wakil Ketua PN Sungai Penuh	Ketua PN Sungai Penuh
20.	Aries Kata Ginting.,S.H.	Hakim	Wakil Ketua PN Sungai Penuh

D. PENSIUN

SDM yang pensiun pada pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Pensiun Tahun 2023

NO.	NAMA	SATUAN KERJA
1.	Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H., M.H.	Pengadilan Negeri Bangko
2.	Rosdiana	Pengadilan Negeri Muara Bulian
3.	Bukhori	Pengadilan Negeri Muara Bulian
4.	Bulyani	Pengadilan Negeri Sengeti
5.	Yulises	Pengadilan Negeri Sungai Penuh

E. DIKLAT

Daftar SDM pada pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2023 yang mengikuti diklat adalah sejumlah 152 (seratus lima puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Diklat Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH HAKIM DAN ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS	JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT NON TEKNIS
1.	Pengadilan Tinggi Jambi	24	7
2.	Pengadilan Negeri Jambi	16	15
3.	Pengadilan Negeri Bangko	5	3
4.	Pengadilan Negeri Muara Bulian	6	2
5.	Pengadilan Negeri Sengei	16	7
6.	Pengadilan Negeri Muara Bungo	7	2
7.	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	2	2
8.	Pengadilan Negeri Sarolangun	13	4
9.	Pengadilan Negeri Sungai Penuh	6	1
10.	Pengadilan Negeri Tebo	3	4
11.	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	7	0
	JUMLAH	105	47

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran. Pengelolaan anggaran yang dilakukan mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan negara tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Di lingkungan Mahkamah Agung, pengelolaan keuangan Negara didasarkan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagai acuan dan gambaran berapa jumlah anggaran yang harus dibelanjakan dan berapa jumlah pendapatan yang ditargetkan dalam setahun.

Pengelolaan DIPA pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu DIPA umum dan DIPA fungsional. DIPA umum dengan unit eselon I Badan Urusan Administrasi (01), diperuntukkan bagi kebutuhan-kebutuhan pokok satuan kerja seperti belanja rutin pegawai, belanja barang baik itu operasional maupun non operasional serta belanja modal. Sedangkan DIPA fungsional dengan unit eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03), diperuntukkan untuk pembiayaan satuan kerja dalam penyelesaian perkara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan.

1. Realisasi Anggaran DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)

Nilai pagu dan realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (01) pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Anggaran DIPA 01 TA. 2023

SATUAN KERJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	REALISASI (%)
PENGADILAN TINGGI JAMBI	23.815.816.000	23.775.598.870	40.217.130	99,83
PENGADILAN NEGERI JAMBI	12.142.086.000	11.775.605.902	366.480.098	96,98
PENGADILAN NEGERI BANGKO	5.524.527.000	5.508.029.102	16.497.898	99.70
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	4.742.453.000	4.591.002.195	151.450.805	96,81
PENGADILAN NEGERI SENGETI	6.549.278.000	6.504.460.968	44.817.032	99,32
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	5.307.756.000	5.298.691.200	9.064.800	99,83
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	4.188.731.000	4.101.336.497	87.394.503	97,92
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	4.520.988.000	4.419.937.151	101.050.849	97,76
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	3.834.937.000	3.765.618.077	69.318.923	98,19
PENGADILAN NEGERI TEBO	4.032.302.000	4.028.594.974	3.707.026	99,91
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	4.062.877.000	3.966.910.077	95.966.923	97,68

2. Realisasi Anggaran DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)

Nilai pagu dan realisasi DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Realisasi Anggaran DIPA 03 TA. 2023

SATUAN KERJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	REALISASI (%)
PENGADILAN TINGGI JAMBI	224.250.000	224.078.000	172.000	99,92
PENGADILAN NEGERI JAMBI	416.945.000	411.861.850	5.038.150	98,78
PENGADILAN NEGERI BANGKO	161.800.000	160.812.985	987.015	99.39
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN	119.500.000	118.954.140	545.860	99,95
PENGADILAN NEGERI SENGETI	144.620.000	144.486.690	133.310	99,91
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO	133.500.000	133.493.000	7.000	99,99
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	122.100.000	118.605.800	3.494.200	98,22
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	107.400.000	107.283.200	116.800	99,89
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH	88.220.000	88.221.406	8.594	99,99
PENGADILAN NEGERI TEBO	108.300.000	108.012.100	287.900	99,73
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR	66.000.000	65.441.800	558.200	99,15

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2023 meliputi kendaraan dinas, rumah dinas, dan sarana prasarana lainnya, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas

Tabel 22. Daftar Kondisi Kendaraan Dinas

SATUAN KERJA	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
PENGADILAN TINGGI JAMBI				
1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Toyota Camry	2018	1	-	-
Toyota Fortuner	2018	1	-	-
Sedan Toyota Colola Altis	2005	1	-	-
Sedan Toyota Vios	2009	1	-	-
Nisan Grand Livina	2011	1	-	-
Toyota Kijang Super	2004	1	-	-
Toyota Kijang INNOVA	2009	1	-	-
2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Honda Mega Pro	2005	1	-	-
Honda Kharisma	2005	1	-	-
Honda GL 160 D	2007	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda GL 160 D	2008	1	-	-
Honda GL 160 D	2008	1	-	-
Honda GL 160 D	2008	1	-	-
Honda Mega Pro	2011	1	-	-
PENGADILAN NEGERI JAMBI				
1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Toyota Kijang Inova BH 1923 AZ	2008	1	-	-
Toyota Kijang Inova BH 1267 AZ	2006	1	-	-
Toyota KF.70 BH 1792 AZ	2001	-	-	1
Toyota Rush BH 1352 AZ	2008	1	-	-
Toyota Vios BH 15 AZ	2008	1	-	-
Nisan X-Trail Hibah dari Pemda Kota Jambi	-	1	-	-
Innova Reborn Hibah dari Pemda kota Jambi BH 5 A	-	1	-	-
2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Honda Karisma 125 D BH 3845 AZ	2005	1	-	-
Honda BH 2191 HZ	2005	1	-	-
Honda Mega Pro BH 4453 AZ	2005	1	-	-
Honda BH 4463AZ	2006	1	-	-
Honda BH 3177 HZ	2006	1	-	-
Honda BH4566 AZ	2008	1	-	-
Honda BH 4568 AZ	2008	-	-	1
Honda BH 2197 HZ	2008	1	-	-
Honda BH 2196 HZ	2008	1	-	-
PENGADILAN NEGERI BANGKO				
1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Mitsubishi Pajero	2007	1	-	-
Toyota Kijang Innova	2007	1	-	-
Toyota Kijang	2001	1	-	-
2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Honda GL Pro BH 6452 FZ	2007	1	-	-
Honda GL Pro BH 6451 FZ	2007	1	-	-
Honda GL Pro BH 6365 FZ	2008	1	-	-
Honda GL Pro BH 6364 FZ	2008	1	-	-
Suzuki Bravo BH 5379 FZ	1998	-	-	1

1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Kijang INNOVA	2006	1	-	-
Toyota fortuner	2008	1	-	-
2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Honda RC 100	1998	1	-	-
Honda GL 160 D	2008	1	-	-
Honda NF 125	2005	1	-	-
Honda GLPIII Mega pro	2005	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Honda NF 125 TD	2008	1	-	-
Supra X 125	2007	1	-	-
PENGADILAN NEGERI SENGETI				
1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Pajero Sport	2018	1	-	-
Kijang INNOVA	2012	1	-	-
Kijang INNOVA	2007	1	-	-
Chevrolet Spin LTZ	2014	1	-	-
Kijang LGX	2004	1	-	-
2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Honda Mega Pro	2008	-	1	-
Honda supra X	2008	-	1	-
Honda Supra X	2008	-	1	-
Honda Mega Pro	2007	-	1	-
Honda Mega Pro	2005	-	-	1
Honda Supra X	2005	-	-	1
Honda GL Max	2005	-	-	1
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO				
1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Kijang INNOVA	2007	1	-	-
Toyota Kijang	2003	-	1	-
2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Honda NF 125 SF	2007	1	-	-
Honda NF 125 TD	2009	1	-	-
Honda Mega Pro	2009	1	-	-
Honda NF 125 TD	2009	1	-	-
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL				
1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Station Wagon (Innova)	2006	-	1	-
Station Wagon (Rush)	2011	1	-	-
Station Wagon (Pajero Sport)	2012	1	-	-
2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Honda Mega Pro	2006	-	1	-
Honda Mega Pro	2007	-	1	-
Honda Mega Pro	2009	-	1	-
Honda Supra	2006	-	1	-
Honda Supra	2009	-	2	-
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN				
1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Mini Bus Pajero	2009	1	-	-
Mini Bus Toyota Inova	2010	1	-	-
2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Sepeda Motor Honda Supra X	2008	1	-	-
Sepeda Motor Honda Supra X	2008	1	-	-
Sepeda Motor Honda Megapro	2008	1	-	-
Sepeda Motor Honda Megapro	2008	1	-	-
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH				
1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Toyota Kijang INNOVA	2007	1	-	-
Toyota AVANZA	2014	1	-	-
Toyota KT	2003	-	-	1

2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Yamaha V.110.E	1997	-	-	1
Yamaha V.105.E	1997	-	-	1
Honda NF 125 SD	2005	-	1	-
Honda NF 125 SD	2005	-	1	-
Honda GLP III	2005	1	-	-
SUPRA X 125	2008	1	-	-
SUPRA X 125	2008	1	-	-
Mega Pro STD	2008	1	-	-
PENGADILAN NEGERI TEBO				
1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Toyota Kijang Innova	2009	1	-	-
Toyota Kijang LSX	2007	1	-	-
Chevrolet Spin	2014	1	-	-
2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Honda Supra X	2007	1	-	-
Honda Supra X	2007	1	-	-
Honda Supra X	2007	1	-	-
Honda Supra X	2008	1	-	-
Honda Supra X	2008	1	-	-
Honda Mega Pro	2008	1	-	-
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR				
1. Jenis Kendaraan Roda 4				
Kijang INNOVA	2009	1	-	-
Chevrolet Spin	2014	1	-	-
2. Jenis Kendaraan Roda 2				
Hona Mega Pro	2008	1	-	-
Honda Supra X 125	2008	1	-	-
Honda supra x 125	2008	1	-	-

2. Rumah Dinas

Tabel 23. Daftar Kondisi Rumah Dinas

SATUAN KERJA	JUMLAH	KONDISI		
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
PENGADILAN TINGGI JAMBI				
1. Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-
3. Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-
4. Rumah Dinas Sekretaris	1	1	-	-
5. Rumah Dinas Hakim	3	3	-	-
6. Rumah Dinas Kepala Bagian	1	1	-	-
PENGADILAN NEGERI JAMBI				
1. Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-
3. Rumah Dinas Hakim	10	10	-	-
PENGADILAN NEGERI BANGKO				
1. Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-
3. Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-
4. Rumah Dinas Sekretaris	1	1	-	-
5. Rumah Dinas Hakim	5	5	-	-

PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN				
1. Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-
3. Rumah Dinas Hakim	10	-	6	4
4. Rumah Penjaga Kantor	1	1	-	-
PENGADILAN NEGERI SENGETI				
1. Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	-	1
3. Rumah Dinas Hakim	7	-	-	7
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO				
1. Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	1	-
3. Rumah Dinas Panitera	1	-	1	-
4. Rumah Dinas Hakim	7	-	-	7
5. Mess Karyawan	1	-	-	1
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL				
1. Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	1	-
3. Rumah Dinas Panitera	1	-	1	-
4. Rumah Dinas Sekretaris	1	-	1	-
5. Rumah Dinas Hakim	4	-	3	1
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN				
1. Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-
3. Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-
4. Rumah Dinas Sekretaris	1	1	-	-
5. Rumah Dinas Hakim	3	3	-	-
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH				
1. Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	1	-
3. Rumah Dinas Panitera	1	-	1	-
4. Rumah Dinas Sekretaris	1	-	1	-
5. Rumah Dinas Hakim	2	-	-	2
PENGADILAN NEGERI TEBO				
1. Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-
3. Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-
4. Rumah Dinas Sekretaris	1	1	-	-
5. Rumah Dinas Hakim	8	8	-	-
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR				
1. Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-
2. Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-
3. Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-
4. Rumah Dinas Sekretaris	1	1	-	-
5. Rumah Dinas Hakim	6	6	-	-

3. Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Tabel 24. Daftar Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

SATUAN KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
PENGADILAN TINGGI JAMBI		
1. GEDUNG		
Ruang Ketua	1	
Ruang Wakil Ketua	1	
Ruang Hakim	4	
Ruang Panitera	1	
Ruang Sekretaris	1	
Ruang Sidang Umum	2	
Ruang Wakil Panitera	1	
Ruang Kepala Bagian	2	
Ruang Kepaniteraan	4	
Ruang Kesekretariatan	4	
Ruang Perpustakaan	1	
Ruang Serba Guna	1	
Ruang Arsip	1	
Ruang Toilet	9	
Asrama	1	
2. FASILITAS PERKANTORAN		
Lemari Penyimpan	6	
Mesin Ketik	1	
Mesin Fotokopi	2	2 Unit dengan status sewa
Lemari Kayu	49	
Lemari Kayu	15	
Rak Metal/besi	15	
Filing Kabinet	39	
Brandkas	3	
Overhead Projector	4	
Meja Kerja Kayu	127	
Kursi Besi/Metal	443	
Kursi Kayu	11	
Sice	22	
Mesin Pemotong Rumput	1	
A.C. Split	54	
Sound System	3	
Komputer	38	
Laptop	45	
Televisi	21	
PENGADILAN NEGERI JAMBI		
1. GEDUNG		
Ruang Ketua	1	
Ruang Wakil Ketua	1	
Ruang Hakim	6	
Ruang Hakim Adhoc PHI	1	
Ruang Hakim Adhoc Tipikor	1	
Ruang Panitera	1	
Ruang Sekretaris	1	
Ruang Sidang Umum	3	
Ruang Sidang Anak	1	
Ruang Sidang PHI	1	
Ruang Sidang Tipikor	1	
Ruang Kepaniteraan	5	
Ruang Kesekretariatan	3	
Ruang Mediasi/Diversi	1	
Ruang Laktasi	1	
Ruang Posbakum	1	
Ruang Jaksa	1	
Ruang Humas	1	
Ruang Perpustakaan	1	
Ruang Arsip	3	
Ruang Sel Tahanan	2	
Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	2	

Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1	
2. *FASILITAS PERKANTORAN*		
Komputer/ PC Unit	49	
Laptop	28	
Infokus	1	
PABX	-	
AC	61	
Genset	1	
Faximile	1	
Server	1	
Router Mikrotik	1	
Switch Hub	16	
Modem	1	
Wifi (access point)	5	
LCD Monitor	1	
Printer	32	
Scanner	2	
CCTV System	1 (23 channel)	
Audio Visual Sidang Tipikor	1	
LED TV	3	
APAR	5	
Finger Print	1	
Handy Talkie	5	
Vestouch Interactive	1	
Mesin Fotocopy	2	
PENGADILAN NEGERI BANGKO		
1. GEDUNG		
Ruang Ketua	1	
Ruang Wakil Ketua	1	
Ruang Hakim	1	
Ruang Panitera	1	
Ruang Sekretaris	1	
Ruang Sidang Umum	2	
Ruang Sidang Anak	1	
Ruang Mediasi /Kaukus /Teleconference /Diversi	1	
Ruang Arsip	1	
Ruang Perpustakaan	1	
Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
Ruang Poliklinik dan Menyusui	1	
Ruang Wakil Panitera	1	
Ruang Tahanan Laki-Laki	1	
Ruang Tahanan Perempuan	1	
Ruang Tunggu Anak	1	
Ruang Posyankum	1	
Ruang Jaksa	1	
Ruang Pidana	1	
Ruang Perdata	1	
Ruang Hukum	1	
Ruang PTIP	1	
Ruang Umum dan Keuangan	1	
Ruang Server	1	
Ruang PTSP	1	
Ruang Sidang Anak	1	
Ruang Tahanan Anak	1	
Mushola	1	
Desk Info	1	
2. FASILITAS PERKANTORAN		
Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1	
Lemari Besi/Metal	1	
Lemari Kayu	29	
Rak Besi	5	
Filing Cabinet Besi	7	
Brandkas	2	
Tabung Pemadam Api	2	
CCTV	1	
Papan Nama/Papan Visual	8	
Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	2	
Mesin Absensi	2	

LCD Projector/Infocus	1	
Papan Gambar	1	
Meja Kerja Kayu	30	
Kursi Besi /Metal	78	
Kursi Kayu	27	
Sice	6	
Bangku Panjang Besi/Metal	12	
Bangku Panjang Kayu	12	
Meja Rapat	7	
Meja Komputer	8	
Tempat Tidur Kayu	1	
Meja Resepsionis	1	
Meja Makan Besi	1	
Partisi	1	
Lemari Es	1	
A.C. Split	16	
Kipas Angin	4	
Exhause Fan	2	
Televisi	2	
Sound System	2	
Unit Power Supply	4	
Lambang Garuda Pancasila	5	
Tiang Bendera	2	
Dispenser	3	
Palu Sidang	3	
Lambang Instansi	1	
Handy Cam	1	
Gordyin/Kray	1	
Microphone/Wirelles MIC	1	
Facsimile	1	
Genset	1	
Lemari Obat (Kaca)	2	
Kamera Digital	1	
Stavol	2	
P.C Unit	15	
Lap Top	16	
Monitor	7	
Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	
Scaner (Peralatan Personal Komputer)	3	
Router	1	
Peralatan Jaringan Lainnya	2	
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN		
1. GEDUNG		
Ruang Ketua	1	
Ruang Wakil Ketua	1	
Ruang Hakim	1	
Ruang Panitera	1	
Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	
Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
Ruang Sidang	1	
Ruang Tahanan	2	
Ruang Mediasi	1	
Ruang Diversi	1	
Ruang Tahanan	1	
Ruang Tahanan Anak	1	
Ruang Tunggu Sidang	1	
Ruang Tunggu PTSP	1	
Ruang Tunggu jaksa	1	
Perpustakaan	1	
Ruang Arsip	1	
Ruang Tamu Terbuka	1	
Ruang server	1	
Toilet	9	

Dapur	1	
2. FASILITAS PERKANTORAN		
Sanner (Universal tester)	1	
Mesin ketik Manual Langewagon	4	
Lemari kayu	113	
Rak kayu	3	
Brankas	2	
Buffet	3	
CCTV	3	
Papan visual/papan nama	11	
White Board	5	
Mesin absensi	2	
Hand Metal Detector	2	
Meja kerja kayu	52	
Kursi besi/metal	108	
Kursi kayu	26	
Sice	8	
Bangku panjang Besi /metal	9	
Bangku panjang kayu	24	
Meja komputer	18	
Meja resepsionis	4	
AC Split	37	
UPS	22	
Camera elektronik	2	
Telephone (PABX)	1	
Facimile	1	
Genset	1	
PC Unit	33	
Laptop	21	
Note Book	2	
PC Lainnya	2	
Speker komputer	2	
Printer	33	
Scanner	1	
Router	1	
Server	2	
Rak server	1	
PENGADILAN NEGERI SENGETI		
1. GEDUNG		
Ruang Ketua	1	
Ruang Wakil Ketua	1	
Ruang Hakim	1	
Ruang Panitera	1	
Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	
Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
Ruang Sidang	3	
Ruang Tahanan	2	
Ruang Mediasi	1	
Ruang Diversi	1	
Ruang Tahanan	1	
Ruang Barang Buktu	1	
Ruang Posbakum	1	
Perpustakaan	1	
Toilet	1	
Poliklinik	1	
Dapur Ruang Genset	1	
2. FASILITAS PERKANTORAN		
Meja Kerja Pimpinan	4	
Meja Kerja Hakim	7	
Meja Kerja Kasub dan Panmud	6	
Meja Kerja Staf	63	
Kursi Kerja Pimpinan	4	

Kursi Kerja Hakim	7	
Kursi Kerja Kasub dan Panmud	6	
Kursi Kerja Staf	18	
Meja Sidang Dewasa	9	
Kursi Sidang Dewasa	16	
Meja Sidang Anak	3	
Kursi Sidang Anak	5	
Kursi Pengujung Sidang	34	
Lemari Toga	4	
Lemari Arsip	16	
Lemari Arsip Hukum	8	
Lemari Buku Perpustakaan	3	
Filling Cabinet	14	
Lemari Besi	6	
Brankas	3	
Meja Informasi	1	
Meja Komputer	14	
Laptop	18	
Komputer	17	
Anjungan Mandiri	1	
UPS	6	
Server	1	
Mikrotik	1	
Rack Server	1	
Jaringan/Hotspot/Wifi	1	
IT/Website	1	
Printer	23	
Scaner	3	
AC Split	30	
Sound System	2	
Genset	2	
Figer Print	2	
TV	5	
CCTV	1	
Faximile	2	
Telephone	13	
PABX	1	
Handycam	1	
Kamera	2	
APAR	3	
Exhaust Fan	2	
Mesin Hitung	10	
Wireless Amplifire	4	
Tower/Tandon Air	2	
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO		
1. GEDUNG		
Ruang Ketua	1	
Ruang Wakil Ketua	1	
Ruang Hakim	2	
Ruang Panitera	1	
Ruang Sekretaris	1	
Ruang Sidang Umum	3	
Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
Ruang Panitera Pengganti	1	
Ruang Tahanan	2	
Ruang Pengacara/ Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	1	
Ruang Umum Dan Keuangan	1	
Ruang PTIP	1	
Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
Ruang Server	1	
Ruang Perpustakaan	1	
Ruang Barang Bukti	1	
Ruang Mediasi/ Diversi	1	
Ruang Tunggu Sidang	1	
Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
Ruang Tunggu jaksa	1	

Ruang Arsip	1	
Ruang Laktasi	1	
Klinik	1	
Kamar Mandi/ WC	7	
Musholla	1	
Gudang	1	
Area Merokok	1	
2. FASILITAS PERKANTORAN		
Komputer	15	
Laptop	24	
Printer	23	
Scanner	2	
Proyektor	1	
Finger Print	1	
Air Conditioner	15	
Faxcimile	1	
PABX	1	
Genset	1	
CCTV	1	
TV LED	2	
Sound System	1	
Mesin Rumput	2	
Mesin Foto Copy	1	
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL		
1. GEDUNG		
Ruang Ketua	1	
Ruang Wakil Ketua	1	
Ruang Hakim	1	
Ruang Panitera	1	
Ruang Sekretaris	1	
Ruang Kepaniteraan	1	
Ruang Kesekretariatan	1	
Ruang Jurusita	1	
Ruang Sidang Umum	3	
Ruang Sidang Anak	1	
Ruang Arsip	1	
Ruang Perpustakaan	1	
Ruang Mediasi	1	
Ruang Diversi	1	
Ruang Tunggu Jaksa	1	
Ruang Tahanan	2	
Ruang Tahanan Anak	1	
Ruang Posbakum	1	
Ruang Barang Bukti	1	
Ruang Tunggu Sidang	2	
Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
Ruang Klinik	1	
Mushola	1	
Toilet	14	
2. FASILITAS PERKANTORAN		
Komputer	15	
Laptop	17	
Infocus	2	
PABX	1	
Mesin Ketik	-	
Mesin Fotocopy	-	
AC Window	11	
Faximile	1	
Genset	1	
UPS	5	
CCTV	1	
Mesin absensi	2	
AC Split	16	
TV	3	
Scanner	2	
Server	1	

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN		
1. GEDUNG		
Ruang Ketua	1	
Ruang Wakil Ketua	1	
Ruang Hakim	1	
Ruang Panitera	1	
Ruang Sekretaris	1	
Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	
Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
Ruang Sidang	3	
Ruang Tahanan	2	
Ruang Mediasi	1	
Ruang Arsip	1	
Ruang Tunggu Jaksa	1	
Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	1	
Ruang Ramah-Tamah	1	
Ruang Kaukus	1	
Ruang Posbakum	1	
Ruang Perpustakaan	1	
Ruang PTSP	1	
Ruang Kasir	1	
Gudang	1	
Musholla	1	
Toilet	6	
2. FASILITAS PERKANTORAN		
Komputer	22	
Laptop	23	
Printer	16	
Proyektor	1	
PABX	1	
Mesin Ketik	2	
Mesin Fotocopy	1	
AC Split	17	
AC Standing	1	
Faximile	1	
Genset	1	
Speaker Portable	1	
TV LED	1	
UPS	6	
CCTV Kamera	10	
Server	2	
Router	1	
Mesin Fingerprint	1	
Lemari Arsip	21	
Lemari Berkas Perkara	12	
Filing Cabinet	13	
Meja Kerja	65	
Kursi Kerja	162	
Meja Komputer	8	
Meja PTSP	1	
Kursi PTSP	8	
PENGADILAN NEGERI TEBO		
1. GEDUNG		
Ruang Ketua	1	
Ruang Wakil Ketua	1	
Ruang Hakim	1	
Ruang Panitera	1	
Ruang Sekretaris	1	
Ruang Sidang Utama	1	
Ruang Sidang II	1	
Ruang Sidang Anak	1	

Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
Ruang Kesekretariatan Umum dan Keuangan	1	
Ruang Kesekretariatan Perencanaan IT dan Pelaporan	1	
Ruang Kesekretariatan Kepegawaian dan Ortala	1	
Ruang Perpustakaan	1	
Ruang Arsip	3	
Ruang Tunggu Jaksa	1	
Ruang Pos Bakum	1	
Ruang Tunggu pihak yang berperkara/ Pengunjung	1	
Ruang Tahanan	2	
Ruang Mediasi	1	
Musholah/ Tempat Ibadah	1	
WC/ Toilet	17	
2. FASILITAS PERKANTORAN		
Computer	27	
Laptop	18	
Infokus	1	
Mesin Ketik	4	
Genset	1	
Printer	28	
Mesin Hitung Listrik	1	
Lemari Besi/ Metal	11	
Lemari Kayu	18	
Rak Besi	5	
Buffet	3	
Meja Kerja Kayu	47	
Kursi besi/ Metal	153	
Kursi Kayu	29	
Sice	11	
Bangku Panjang Kayu	21	
Meja Komputer	9	
Soundsystem	1	
AC Split	30	
Kipas Angin	8	
Facsimile	1	
Telephone	2	
Telephone PABX	16	
Brandkas	3	
Filing Cabinet Metal	13	
White Board	5	
Papan Visual/ Nama	4	
Tabung Pemadam Api	3	
Televisi	4	
Jam Dinding	11	
Tiang Bendera	4	
Lambang Instansi	1	
Kabel Roll	1	
Camera Digital	1	
Stabilizer/ UPS	26	
Server	1	
Hub	1	
Modem	1	
Router	1	
Palu Sidang	5	
PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR		
1. GEDUNG		
Ruang KPN	1	
Ruang WKPN	1	
Ruang Hakim	1	
Ruang Panitera	1	
Ruang Sekretaris	1	
Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
Ruang Subbagian Kepegawaian, Organisasi Dan	1	

	Tatalaksana		
	Ruang Sub Bagian Umum Dan Keuangan	1	
	Ruang Sub Bagian Perencanaan, It Dan Pelaporan	1	
	Ruang Mediasi/Diversi/Kaukus	1	
	Ruang Barang Bukti	1	
	Ruang Poliklinik	1	
	Ruang Tahanan Anak	1	
	Ruang Tunggu Jaksa	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Tahanan	2	
	Ruang Sidang	2	
	Toilet	5	
2.	FASILITAS PERKANTORAN		
	Lemari Besi/Metal	14	
	Lemari Kayu	48	
	Rak Besi	3	
	Rak Kayu	6	
	Filing Cabinet Besi	10	
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2	
	White Board	17	
	Alat Penghancur Kertas	1	
	Mesin Absensi	1	
	LCD Projector/Infocus	2	
	Meja Kerja Kayu	61	
	Kursi Besi/Metal	142	
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
	Digital LED Running Text	1	
	Facsimile	1	
	Genset	2	
	Internet	1	
	Komputer Jaringan Lainnya	1	
	P.C Unit	27	
	Lap Top	18	
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	
	Server	2	
	Router	2	
	Rak Server	2	
	Closed Circuit Television (CCTV)	1	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik. E-Court terdiri dari E-Filling (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), E-Summons (Pemanggilan Pihak Secara Online), dan E-Litigation (Persidangan Secara Online).

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online. Pada tahun 2023, seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi seluruhnya telah menerapkan E-court.

Tabel 25. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Tahun 2023

SATUAN KERJA	Jumlah perkara yang didaftarkan melalui E-court	Perkara Gugatan	Perkara Gugatan Sederhana	Perkara Bantahan	Permohonan	*Konsinyasi*
PT JAMBI	106	-	-	-	-	-
PN JAMBI	456	196	44	-	216	-
PN BANGKO	114	28	67	-	18	1
PN MUARA BULIAN	42	28	2	-	12	-
PN SENGETI	95	66	10	-	19	-
PN KUALA TUNGKAL	23	21	1	-	1	-
PN SAROLANGUN	61	32	20	-	9	-
PN MUARA BUNGO	72	41	23	-	8	-
PN SUNGAI PENUH	231	60	32	1	137	1
PN TEBO	72	22	45	-	5	-
PN TANJUNG JABUNG TIMUR	52	10	-	-	42	-

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Peningkatan administrasi, transparasi, dan akuntabilitas di seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut dikarenakan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam suatu sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung RI untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia, mengawasi kinerja hakim dan staf pengadilan lain, memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pencari keadilan, publik, dan media, dan mendukung transisi menuju sistem yang terkomputerisasi.

SIPP sebagai salah satu pilar utama terlaksananya program *E-Court* dan *E-Ligitasi* yang saat ini menjadi program utama, dan sekaligus fungsi pokok dari adanya aplikasi SIPP. SIPP adalah aplikasi untuk memberikan informasi terkait proses penanganan perkara kepada pencari keadilan dan *stakeholder* Pengadilan diwilayah Pengadilan Tinggi Jambi, SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja Hakim dan aparat peradilan. Selain itu SIPP juga merupakan bentuk transparasi akuntabilitas dan keterbukaan informasi lembaga peradilan kepada masyarakat sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan Informasi.

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Jambi dan satker dibawahnya melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satuanya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE).

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

(1) Kepemimpinan (leadership);
(2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
(3) Fokus Pelanggan (customer focus);
(4) Sistem Dokumentasi (document system);
(5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
(6) Manajemen Proses (process management); dan
(7) Hasil Kinerja (performance results).

B. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pimpinan Pengadilan Tinggi Jambi beserta seluruh jajarannya telah berkomitmen untuk mewujukan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui langkah reformasi birokrasi dengan melaksanakan pembangunan Zona Integritas.

C. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang biasa lebih dikenal dengan istilah PTSP merupakan jawaban dari Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Jambi dalam hal memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, dimana Pengadilan Tinggi Jambi terus menerus berupaya meningkatkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hadir sebagai jawaban terhadap kritik masyarakat terhadap Pengadilan yang dianggap tidak terbuka (transparan) dan akuntabel. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Seluruh Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi telah menerapkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berpedoman pada SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

D. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Untuk mewujudkan Kinerja Peradilan yang Prima, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri secara berkesinambungan terus melakukan pembenahan dan inovasi terhadap segala jenis layanan baik dari segi teknologi informasi dan sarana prasarana yang nantinya akan menunjang kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan di lingkungan Peradilan.

Tabel 26. Inovasi pengadilan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi

No.	Satuan Kerja	Inovasi
1.	Pengadilan Tinggi Jambi	Aplikasi LINTAS, Aplikasi AMORA
2.	Pengadilan Negeri Jambi	aplikasi Sistem Informasi Digital Pelayanan Pengadilan (SIDILAN)
3.	Pengadilan Negeri Bangko	Aplikasi E-SAMPURNA, aplikasi SI-PEPENG, Aplikasi Antrian OnlinE, Aplikasi Duta Layanan SAD, Aplikasi E- SEKSI
4.	Pengadilan Negeri Muara Bulian	Aplikasi Permohonan Penelitian Online (LION), Form Tamu Elektronik
5.	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Informasi Berbasis Teknologi Melalui Whatsapp (ISTIMEWA), Tuna Rungu Talking On (NARUTO), aplikasi Sikumbang, dan Pojok Kerja
6.	Pengadilan Negeri Muara Bungo	Aplikasi E-Brosur, brosur dalam huruf Braille, aplikasi E-Bezuk, aplikasi SISUKE
7.	Pengadilan Negeri Sengeti	Aplikasi Sistem Informasi Terpadu (SINTA)
8.	Pengadilan negeri Sungai Penuh	Aplikasi E-Brosur,
9.	Pengadilan Negeri Sarolangun	Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPELIK), Layanan Informasi Digital Bantuan Hukum (Lidibakum)
10.	Pengadilan Negeri Tebo	Aplikasi Layanan Informasi Pengadilan (ALIP), Aplikasi E-brosur, aplikasi SEMPOL, aplikasi SIMPEL
11.	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	Aplikasi SIVA, aplikasi SRI PELABI, aplikasi layanan barcode, aplikasi ASOY PUSING, aplikasiE-RIANG, aplikasi ABDIcute

BAB VI
PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Tinggi Jambi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jambi adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara prefentif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Tinggi Jambi meliputi Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi, Pengawasan dan Pembinaan Bidang-bidang pada Pengadilan Tinggi Jambi, dan menindaklanjuti pengaduan

1. Pengawasan Daerah

Untuk melaksanakan pengawasan pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 3024/KPT.W5-U/KP7.1/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah:

1) Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan perkara dan hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya baik teknis maupun administrasi peradilan, untuk mengecek tindaklanjutnya
2) Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan pemeriksaan dokumen, laporan daerah pembinaan dan pengawasan
3) Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan

Adapun hasil pengawasan daerah pada tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

1) Pada umumnya administrasi dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis maupun kesekretariatan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
2) Kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pegawai pada setiap satuan kerja sehingga banyak formasi jabatan yang kosong
3) Kendala lain adalah kondisi sarana dan prasarana yang masih banyak perlu pembaruan dan pengadaan

Rincian Pengawasan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 27. Pengawasan Daerah Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan Pengawasan	Subjek Pengawasan	Objek yang diawasi	Waktu	Tempat	Kesimpulan
1.	Pembinaan, Pengawasan	Pengadilan Negeri Jambi	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	6-7 Maret 2023 dan 17-18 Oktober 2023	Pengadilan Negeri Jambi	Pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan tupoksi. Secara umum berjalan dengan baik, temuan-temuan hasil pengawasan bersifat minor dan sudah ditindak lanjuti
2.	Pembinaan, Pengawasan	Pengadilan Negeri Bangko	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	7-9 Maret 2023 dan 2-5 Oktober 2023	Pengadilan Negeri Bangko	Pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan tupoksi dan SOP, secara umum berjalan dengan baik, temuan-temuan hasil pengawasan bersifat minor dan langsung ditindak lanjuti
3.	Pembinaan, Pengawasan	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	6-7 Maret 2023 dan 3-5 Oktober 2023	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Secara umum tugas sudah sesuai dengan tupoksi dan berjalan dengan baik, temuan-temuan hasil pengawasan bersifat minor dan sudah ditindak lanjuti
4.	Pembinaan, Pengawasan	Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	6-9 Maret 2023 dan 9-12 Oktober 2023	Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan tupoksi dan SOP. Secara umum berjalan dengan baik, temuan-temuan hasil pengawasan bersifat minor dan langsung ditindak lanjuti.
5.	Pembinaan, Pengawasan	Pengadilan Negeri Muara Bungo	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	28 Feb – 2 Maret 2023 dan 10-12 Oktober 2023	Pengadilan Negeri Muara Bungo	Pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan tupoksi. Secara umum berjalan dengan baik, temuan-temuan hasil pengawasan bersifat minor dan langsung ditindak lanjuti

6.	Pembinaan, Pengawasan	Pengadilan Negeri Muara Bulian	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	27-28 Feb 2023 dan 4-5 Oktober 2023	Pengadilan Negeri Muara Bulian	Secara umum tugas sudah sesuai dengan tupoksi dan berjalan dengan baik, temuan-temuan hasil pengawasan bersifat minor dan sudah ditindak lanjuti
7.	Pembinaan, Pengawasan	Pengadilan Negeri Sengeti	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	1-2 Maret 2023 dan 17-18 Oktober 2023	Pengadilan Negeri Sengeti	Secara umum tugas sudah sesuai dengan tupoksi dan berjalan dengan baik, temuan-temuan hasil pengawasan bersifat minor dan sudah ditindak lanjuti
8.	Pembinaan, Pengawasan	Pengadilan Negeri Tebo	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	28 Feb – 2 Maret 2023 dan 10-12 Oktober 2023	Pengadilan Negeri Tebo	Pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan tupoksi dan SOP. Secara umum berjalan dengan baik, temuan-temuan hasil pengawasan bersifat minor dan langsung ditindak lanjuti
9.	Pembinaan, Pengawasan	Pengadilan Negeri Sarolangun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	7-9 Maret 2023 dan 2-5 Oktober 2023	Pengadilan Negeri Sarolangun	Secara umum tugas sudah sesuai dengan tupoksi dan berjalan dengan baik, temuan-temuan hasil pengawasan bersifat minor dan sudah ditindak lanjuti
10.	Pembinaan, Pengawasan	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	27-28 Feb 2023 dan 2-3 Oktober 2023	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	Pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan tupoksi dan SOP. Secara umum berjalan dengan baik, temuan-temuan hasil Pengawasan bersifat minor dan langsung ditindak lanjuti

2. Pengawasan Bidang

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 3023/KPT.W5-U/KP7.1/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas/Pembinaan Bidang-Bidang Pengadilan Tinggi Jambi. Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah :

A. Bidang Teknis

1) Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara banding, di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi
2) Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara banding
3) Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara banding
4) Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding

5) Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara banding
6) Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara banding
7) Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara
8) Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

B. Bidang Kesekretariatan

1) Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan
2) Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Adapun hasil pengawasan bidang pada Pengadilan Tinggi Jambi tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut :

1) Pola Bindalmin telah berjalan sesuai ketentuan dalam buku Pola Bindalmin, namun masih terdapat kurang ketelitian dalam melaksanakan tugas.
2) Penerapan hukum acara dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi secara substansi sudah baik.
3) Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik
4) Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sudah baik
5) Penyusunan surat-surat yang terdapat pada Bundel B dan dalam berkas perkara tingkat banding secara umum telah terlaksana dengan baik.
6) Penyelesaian minutasi berkas-berkas perkara banding, baik di Bagian Kepaniteraan Pidana, Perdata maupun di Kepaniteraan Hukum telah berjalan baik.
7) Pengawasan disiplin Hakim dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Jambi sudah baik, namun perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan professional.
8) Pembukuan Keuangan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya sudah sesuai peraturan
9) Sistem administrasi perlengkapan BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik
10) Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan baik
11) Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi
12) Pengembangan Teknologi & Informasi pada Pengadilan Tinggi Jambi sudah berjalan baik

3. Penanganan Pengaduan

Pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Jambi Pada Tahun 2023 sebanyak 15 (lima belas) pengaduan dan sudah ditindaklanjuti dengan penanganan pengaduan tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 28. Penanganan Pengaduan Tahun 2023

No.	Asal Surat	Pelapor	Terlapor / Tujuan Surat	Perihal Pengaduan	Keterangan
1.	Panitera Mahkamah Agung RI (Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H.)	Busrin Yunar	KPT Jambi	Menindaklanjuti Disposisi KMA tanggal 18 November 2022, Nomor : 3309/SET.KMA.IIA/XI/2022, untuk menanggapi surat dari Sdr. Busrin Yunar tanggal 11 November 2022	1. Telah diteruskan kepada Tim Eksekusi untuk ditelaah. 2. Tim Eksekusi telah melakukan penelaahan 3. Sudah selesai ditindaklanjuti
2.	Marda'I Yusuf	Marda'I Yusuf	KPN Sarolangu	Agar Majelis Hakim Yang mengadili Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2022/PN Srl, mengambil Keputusan sesuai fakta di persidangan dan fakta di lapangan	Sudah ditindaklanjuti
3.	Panitera Mahkamah Agung RI (Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H.)	Siti Fauziah, dkk	KPT Jambi	Menaggapi surat dari Siti Fauziah, dkk tanggal 16 Januari 2023, sebagai voorpost MA untuk dipertimbangkan kemudian dilaporkan hasilnya kepada Mahkamah Agung R.I.	1. Surat Pengaduan sudah diserahkan ke Bapak Suwarno untuk ditelaah 2. sudah selesai ditindaklanjuti
4.	Ahmad Sabki, dkk	Ahmad Sabki, dkk	Ketua Mahkamah Agung R.I.	Pengaduan	1. Petugas Pengaduan telah menginput pengaduan ke SIWAS dengan kode 959FZ20230327TX tanggal 27 Maret 2023. 2. Menunggu tindalanjut dari BAWAS
5.	Kamaruddin Simanjuntak dan Hendry Gunawan	Kamaruddin Simanjuntak dan Hendry Gunawan	KPT Jambi	Putusan Sela Hakim Sewenang-wenang	1.Petugas Pengaduan telah meningput pengaduan ke SIWAS dengan kode 7HX6P202304003QV tanggal 3 April 2023. 2.Menunggu tindaklanjut dari BAWAS
6.	Filmarico, S.H.	Filmarico, S.H.	KPT Jambi	Melaporkan proses Eksekusi yang belum dilaksanakan dan permohonan untuk eksekusi dapat segera dilaksanakan dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Srl. Jo Putusan PT Jambi No. 59/PDT JMB	1.Sudah diinformasikan ke Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk ditelaah secara Bersama-sama. 2.Proses telaah sudah selesai 3.Sudah selesai ditindaklanjuti
7.	Panitera Mahkamah Agung RI	Marda'I Yusuf	KPT Jambi	Menanggapi surat pengaduan dari sdr. Marda'I Yusuf, dkk tanggal 27 April 2023, perihal Mafia Tanah di Kabupaten Sarolangun Prov. Jambi	1.Mengirimkan surat ke KPN Sarolangun, agar Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut betul-betul menjaga KEPPH 2.Surat telah diterima KPN Sarolangun 3.Sudah selesai ditindaklanjuti

8.	Hoesri, HS, S.H.	Marda'I Yusuf	KPN Sungai Penuh	Tindaklanjut permohonan Eksekusi tanggal 29 September 2022 yang ditujukan kepada KPN Sungai Penuh	1.Surat Pengaduan ditelaah Bersama Tim Eksekusi untuk menentukan tindaklanjutnya. 2.Sudah selesai ditindaklanjuti
9.	Muchtar Agus Cholif, S.H.	Muchtar Agus Cholif, S.H.	Hakim Pengawas PT. Jambi	Perbuatan tercela Hakim dalam perkara Perdata no. 3/Pdt.G/2023/PN Bko, telah melakukan perbuatan tercela sehingga pelapor menjadi korban ketidakadilan dari majelis tersebut	1.Petugas Pengaduan telah menginput surat pengaduan tersebut ke SIWAS dengan kode H7K5K20230727IN 2.Menunggu proses tindaklanjut dari BAWAS
10.	Andrian Evendi, SH dan Ardiansyah, SH	Andrian Evendi, SH dan Ardiansyah, SH	KPT Jambi	1.Pengaduan Perkara Nomor 09/Pdt.G/2023/PN Srl, bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sidang tatap muka dipersidangan dengan agenda mendengar dan membaca jawaban para Tergugat; 2.Penggugat sebelum dibacakan jawaban para Tergugat kami mengajukan pencabutan perkara dengan alas an akan memperbaiki gugatan atas persetujuan klien kami.	1.Petugas Pengaduan telah menginput surat pengaduan tersebut ke SIWAS dengan kode H7K5K20230727IN 2.Menunggu proses tindaklanjut dari BAWS
11.	Cori Siska, dkk	Cori Siska, dkk	KPT Jambi	Laporan	1.Mengirimkan surat ke KPN Sungai Penuh untuk memberikan klarifikasi atas surat pengaduan tersebut. 2.KPN Sungai Penuh telah memberikan surat klarifikasi 3.Sudah selesai ditindaklanjuti
12.	Pranata Law Firm	1. Omar Syarif 2. Abdallah, 3. Nurromalia, Wisnu Eka Saputra	KPN Sengeti	1.Pemberitahuan dan permohonan bahwa Pemeriksaan setempat telah selesai dilaksanakan dan telah dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim dalam putusan nomor 05/Pdt.G/2023/PN Snt yang diputus tanggal 5 Oktober 2023; 2.Namun saat ini kami melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berkas pemeriksaan setempat tidak dapat diperlihatkan kepada kami.	1.Sudah dikirimkan surat ke KPN Sengeti untuk memberikan klarifikasi atas surat Pengaduan tersebut 2.Sudah selesai ditindaklanjuti
13.	Sekar Wulan	Sekar Wulan	Lenni Agustina Sihombing, S.E.,M.H.	Laporan Pelanggaran Disiplin Pegawai an. Lenni Agustina Sihombing, SE.,M.H.	1.Telah dilakukan Pemeriksaan oleh Tim 2.Laporan Hasil Pemeriksaan dikirimkan ke BAWAS tanggal 3 November 2023 3.Sudah selesai dan ditindaklanjuti
14.	H. Ecep Supriyanto	H. Ecep Supriyanto	Lenni Agustina Sihombing, S.E.,M.H.	Pencabutan Laporan Pengaduan terhadap Lenni Agustina Sihombing, S.E.,M.H.	1.Surat dari Sdr. H. Ecep Supriyanto telah disampaikan ke WKPT tanggal 28 November 2023 2.Sudah selesai dan ditindaklanjuti

15.	KPN Muara Bulian	Sri Peni Yudawati, S.H.	Rido Febriadi, S.Kom	Pengaduan atas pelanggaran disiplin pegawai Pengadilan Negeri Muara Bulian an. Rido Febriadi, S.Kom	1.Sudah ditelaah oleh Hakim Bapak Suwarno. 2.Petugas Pengaduan sudah menginput surat tersebut di SIWAS 3.Sudah selesai dan ditindaklanjuti

B. EVALUASI

Pada tahun 2023 dilakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang di Pengadilan Tinggi Jambi maupun satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Melaksanakan briefing setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri di bawahnya.
2) Membuat kontrak kinerja, monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa satker tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan /kontrak kinerja pada tahun sebelumnya. Terhadap satker yang belum melakukan tindak lanjut sesuai dengan kesepakatan kontrak kinerja akan diberikan sanksi dan dipantau secara intensif
3) Pada tahun 2023, evaluasi pelayanan peradilan juga dilakukan melalui :
    a. Survei Kepuasan Masyarakat secara elektronik untuk melihat respon terhadap pelayanan publik. Hasil survei kepuasan pelanggan sejumlah responden terhadap 9 (sembilan) ruang lingkup layanan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 4,00/100% dengan mutu pelayanan SANGAT BAIK.
    b. Survey Presepsi Anti Korupsi secara elektronik untuk melihat hasil survei masyarakat terhadap Presepsi Korupsi di Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2023, hasil Indeks Presepsi Korupsi sejumlah responden sebesar 4,00/100% dengan mutu presepsi BERSIH DARI KORUPSI.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Pelaksaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik
4. Seluruh pengadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi sudah menerapkan Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu
5. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi sudah menerapkan aplikasi E-Court dengan fitur e-filling (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), sehingga pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan
6. Pengadilan Negeri diseluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi saat ini berusaha untuk mengimplementasikan Aplikasi e-BERPADU untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik.

B. Saran

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, maka diperlukan:

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
2. Penambahan sumber daya keuangan
3. Penambahan sumber daya infrastruktur